

**FEMINIST MOVEMENTS AND THE CHALLENGES OF PATRIARCHY IN
INDONESIAN MASS MEDIA**

**GERAKAN FEMINISME DAN TANTANGAN PATRIARKI DI MEDIA MASSA
INDONESIA**

Ummi Salamah Sitorus¹, Moulita², Arief Marizki Purba³, Mujahid Widian Saragih⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia¹

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{2,3,4}

*ummisalamahsitorus@uinsu.ac.id

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study explores the dynamics of the feminist movement in confronting patriarchal challenges within Indonesia's mass media. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews and observations involving five key informants engaged in media and feminism. Findings reveal that feminist representation in mainstream media remains limited and often biased. Feminist narratives are frequently simplified, reinforcing negative stereotypes aligned with patriarchal values. Feminist activists face significant barriers, including limited access to mainstream platforms, editorial constraints, and digital harassment. However, social media has emerged as a powerful alternative space to expand gender equality discourse. This research highlights the need for critical communication strategies, the strengthening of alternative media, and digital literacy to counter patriarchal dominance. The media bears an ethical responsibility to present fair, inclusive, and consistent narratives in support of feminist movements in Indonesia.

Keywords: feminism, patriarchy, mass media, gender representation, digital media

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika gerakan feminisme dalam menghadapi tantangan patriarki di media massa Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap lima narasumber yang terlibat dalam isu media dan feminisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi feminisme dalam media masih terbatas dan cenderung bias. Media kerap menyederhanakan narasi feminis serta memperkuat stereotip negatif yang berpihak pada nilai-nilai patriarkal. Aktivis feminis menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan akses media arus utama hingga tekanan redaksional dan serangan digital. Namun, media sosial membuka ruang baru yang memungkinkan perluasan wacana kesetaraan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi komunikasi yang kritis, penguatan media alternatif, dan literasi digital untuk melawan dominasi patriarki. Media memiliki tanggung jawab etis untuk menghadirkan narasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung gerakan feminisme di Indonesia.

Kata kunci: feminisme, patriarki, media massa, representasi gender, media digital

1. PENDAHULUAN

Gerakan feminisme di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang tidak selalu mudah (L. K. Alfirdaus et al., 2022a). Sejak masa awal pergerakan perempuan seperti yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh seperti Kartini dan Dewi Sartika, perjuangan perempuan Indonesia telah bertransformasi dari isu pendidikan dan emansipasi menuju perjuangan kesetaraan hak dalam segala aspek kehidupan (Maryani et al., 2021). Seiring dengan perkembangan zaman, gelombang feminisme global turut mempengaruhi pola pikir dan aksi kolektif perempuan di Indonesia, terutama dalam memperjuangkan hak-hak politik, ekonomi, dan kebebasan berekspresi (Deem & Deem, 2023). Namun, gerakan feminisme di tanah air masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah dominasi nilai-nilai patriarki yang masih tertanam kuat di

masyarakat, termasuk di media massa sebagai salah satu instrumen pembentuk opini publik (Moore & Sirri, 2024).

Media massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki peran vital dalam membentuk persepsi masyarakat tentang gender (Figuroa-Domecq & Segovia-Perez, 2020). Namun ironisnya, media justru sering mereproduksi dan melanggengkan stereotip gender yang merugikan perempuan (Edström et al., 2024). Representasi perempuan di media kerap kali dipersempit dalam peran domestik, objek seksual, atau figur pendukung semata, bukan sebagai subjek aktif yang memiliki kekuatan dan intelektualitas (Hamid et al., 2021). Perempuan dalam berita atau iklan sering kali tidak digambarkan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, atau sosok yang berdaya, melainkan sebagai pelengkap narasi laki-laki atau komoditas yang ditampilkan demi kepentingan ekonomi (L. K. (Laila) Alfirdaus et al., 2022). Pola ini menunjukkan bahwa dominasi patriarki masih sangat kuat, di mana nilai-nilai maskulin dianggap lebih superior dan layak ditonjolkan, sedangkan nilai-nilai feminin cenderung dimarginalkan (Gupta et al., 2023).

Lebih jauh lagi, media massa tidak hanya mencerminkan struktur sosial patriarkal, tetapi juga turut memperkuatnya melalui pemilihan narasi, penggunaan bahasa, dan penyuntingan konten (Demirhan & Çakir-Demirhan, 2015). Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi gerakan feminis yang berusaha mengangkat suara perempuan dan menuntut kesetaraan di ruang publik. Dalam banyak kasus, suara feminis kerap kali dianggap ancaman terhadap "tatanan moral tradisional" atau bahkan dituduh sebagai upaya mengadopsi budaya Barat (Fotaki & Pullen, 2024). Akibatnya, diskursus feminisme di media massa Indonesia kerap dihadapkan pada resistensi, baik dari kalangan konservatif maupun dari sebagian masyarakat yang belum memahami substansi perjuangan kesetaraan gender (Valdivia & Projansky, 2006).

Tantangan ini menjadi lebih kompleks dalam era digital dan media sosial, di mana arus informasi begitu cepat menyebar, namun tak selalu kritis atau berbasis fakta (Nazneen & Okech, 2021). Gerakan feminisme digital memang membuka ruang baru bagi aktivisme perempuan, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang memegang teguh nilai-nilai patriarkal (Prasetya & Oktafiyani, 2023). Di tengah derasnyanya arus informasi ini, media massa konvensional maupun digital di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk bersikap adil dan objektif dalam menyuarakan isu-isu kesetaraan gender. Namun kenyataannya, masih dibutuhkan upaya besar untuk mendorong media agar menjadi wadah yang berpihak pada keadilan gender, bukan justru memperkuat bias patriarkal yang menindas (L. K. Alfirdaus et al., 2022b).

Oleh karena itu, kajian terhadap gerakan feminisme dan tantangan patriarki dalam media massa Indonesia menjadi penting untuk memahami sejauh mana perjuangan perempuan mendapat ruang dan pengakuan yang adil. Penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran akan perlunya transformasi narasi media yang lebih berpihak pada kesetaraan gender dan mendukung gerakan feminisme dalam menghadapi hegemoni patriarki di ruang publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Peneliti mewawancarai lima narasumber yang relevan dengan isu feminisme dan media massa. Narasumber terdiri dari: NS, aktivis feminis komunitas lokal; ND, jurnalis perempuan media daring; NT, redaktur senior media cetak; NK, dosen komunikasi dan gender; serta NF, pengamat media dan aktivis literasi digital. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan narasi kesetaraan gender di media. Selain itu, observasi dilakukan terhadap pemberitaan di media massa mengenai isu-isu perempuan, termasuk cara media menyajikan tokoh atau gerakan feminis. Data dianalisis secara tematik untuk melihat pola representasi gender dan dominasi patriarki yang muncul. Metode ini

bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana gerakan feminisme menghadapi tantangan patriarki dalam ranah media massa di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Representasi Gerakan Feminisme dan Narasi Patriarki dalam Media Massa

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik tentang gerakan feminisme. Namun, bias patriarki sering kali muncul dalam pemberitaan dan framing terhadap isu-isu kesetaraan gender.

NS menyampaikan bahwa representasi feminisme di media masih sangat terbatas dan sering distigma. "Biasanya media menggambarkan feminisme sebagai hal negatif, terlalu keras atau melawan budaya lokal." Begitu juga dengan ND yang menambahkan, "Feminisme hanya muncul saat momen tertentu, misalnya Hari Perempuan, tapi tidak menjadi wacana yang berkelanjutan." Artinya, media kerap kali memperlakukan isu ini sebagai seasonal, bukan sebagai topik penting yang perlu dikawal secara terus menerus.

Lalu NT juga menyoroti bahwa pemberitaan media cenderung menyederhanakan isu feminisme. "Isunya dipotong-potong dan tidak dimunculkan konteks perjuangannya." Hal ini memperlihatkan bahwa media hanya menampilkan permukaan, tanpa menyelami akar persoalan yang lebih dalam.

Demikian pula NK menyampaikan bahwa dominasi patriarki masih kuat di ruang redaksi. "Banyak redaktur tidak memiliki perspektif gender, sehingga framing-nya bias." Pernyataan ini menunjukkan bahwa bias struktural dalam lembaga media menjadi hambatan utama dalam menghadirkan representasi yang adil.

Tak ketinggalan, NF pun menegaskan bahwa media digital pun tak lepas dari bias. "Meskipun lebih terbuka, banyak konten di media sosial yang justru menyudutkan gerakan feminis." Bahkan platform yang dianggap progresif seperti media digital pun ternyata dapat mereproduksi wacana patriarki.

Maka, kelima narasumber sepakat bahwa representasi feminisme di media massa masih dipenuhi tantangan, terutama dalam melawan narasi patriarkal yang dominan. Perlu ada upaya bersama yang sistematis untuk membangun representasi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif dalam ruang media.

2. Tantangan Aktivistis Feminisme dalam Melawan Patriarki di Media

Aktivistis feminis tidak hanya berjuang di lapangan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam memanfaatkan media massa sebagai sarana perjuangan. NS mengungkapkan, "Keterbatasan akses ke media arus utama jadi kendala utama. Banyak pesan feminis sulit menembus ruang redaksi yang konservatif dan bias." Begitu juga dengan ND yang menyatakan bahwa "Sulit karena banyak media mengutamakan rating atau klik. Isu feminis yang serius sering dianggap tidak menjual atau tidak menarik." Ini menunjukkan bahwa logika pasar kerap kali bertabrakan dengan agenda perjuangan feminis.

Lalu NT menyampaikan, "Ada tekanan dari pemilik media yang takut isu feminisme memicu kontroversi. Aktivistis harus pintar-pintar menyusun narasi agar tidak disensor." Sehingga, aktivis feminis harus bermain cerdas dalam strategi komunikasi publik mereka.

NK menambahkan dari sisi kapasitas internal gerakan bahwa "Keterbatasan literasi media aktivis sendiri juga jadi tantangan. Tidak semua tahu cara mengemas pesan secara strategis agar diterima publik luas." Artinya, perjuangan tidak hanya soal pesan, tapi juga soal bagaimana menyampaikannya.

Sementara itu, NF mengungkap, "Serangan digital dan penyebaran hoaks yang menyudutkan gerakan feminis di platform online menjadi tantangan serius yang perlu strategi khusus." Ini menegaskan bahwa ruang digital pun bukan zona aman bagi aktivis.

Media bisa menjadi pedang bermata dua bagi aktivis feminis. Selain menyuarakan perjuangan, media juga bisa menjadi alat represi ketika bias patriarki mendominasi. Maka perlu penguatan strategi komunikasi serta penguasaan ruang digital secara taktis.

3. Peran Media dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender

Media seharusnya tidak hanya menjadi cermin realitas sosial, tapi juga aktor perubahan dalam mendorong kesetaraan gender.

NS menyatakan, "Saya berharap media lebih berpihak, memberi ruang setara, dan menghapus narasi yang menyudutkan perempuan atau melemahkan perjuangan feminisme." Begitu juga dengan ND yang menambahkan, "Harapannya media bisa konsisten menyuarakan isu gender, tidak hanya saat momen tertentu, tapi menjadi bagian dari kebijakan editorial." Hal ini menunjukkan pentingnya kontinuitas dalam pemberitaan isu-isu feminis.

NT menyebutkan, "Saya ingin media menjadi ruang edukasi publik yang objektif, humanis, dan bebas dari bias patriarki terhadap perempuan." Pendapat ini menekankan fungsi pendidikan yang dimiliki media, selain sebagai penyampai informasi.

Lalu NK menyarankan, "Media harus menjadi mitra perubahan sosial dengan membangun narasi inklusif, menyuarakan keragaman perempuan, dan menantang konstruksi gender yang timpang." Ini berarti media harus mengambil peran aktif dalam dekonstruksi nilai-nilai patriarkal.

NF pun sependapat, menyatakan bahwa "Saya berharap media digital mendorong kesadaran kritis publik, membentuk ekosistem informasi yang mendukung kesetaraan dan melindungi aktivis dari serangan digital." Dengan kata lain, media juga punya tanggung jawab etis dalam membangun ruang aman dan adil.

Media memiliki peran strategis sebagai pembentuk opini dan perubahan sosial. Harapan besar diletakkan pada media untuk menjadi mitra gerakan feminisme dalam menciptakan ruang yang adil bagi semua gender, dengan narasi yang konsisten dan progresif.

4. Strategi Melawan Dominasi Patriarki dalam Media

Menghadapi dominasi patriarki dalam media membutuhkan strategi yang sistematis, baik dari dalam institusi media maupun dari luar.

NS menyarankan, "Perlu membangun media alternatif yang berpihak pada keadilan gender dan memperkuat kolaborasi antara aktivis dan jurnalis perempuan." Begitu pula dengan ND yang menekankan pentingnya edukasi internal. "Jurnalis perlu pelatihan gender agar bisa memproduksi konten yang adil dan tidak bias."

NT menambahkan bahwa "Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan redaksi dan membuka ruang diskusi publik lewat media adalah langkah strategis." Hal ini menekankan pentingnya kebijakan institusional dalam membawa perubahan. Lalu NK berpendapat bahwa "Advokasi terhadap lembaga media, kurikulum pendidikan jurnalistik, dan regulasi penyiaran berbasis keadilan gender bisa jadi solusi jangka panjang." Jadi, transformasi media harus dimulai dari level pendidikan dan regulasi formal.

NF menyoroti kekuatan media digital dengan mengatakan bahwa "Mengoptimalkan media sosial dan memperkuat literasi digital masyarakat bisa jadi alat melawan dominasi patriarki." Artinya, strategi juga harus mencakup penguatan kapasitas publik dalam menyaring dan memproduksi informasi.

Kesimpulannya, strategi efektif harus dilakukan secara kolektif, mulai dari edukasi jurnalis, reformasi redaksi, advokasi kebijakan, hingga penguatan media alternatif dan literasi digital. Pendekatan multilevel ini menjadi kunci perlawanan terhadap patriarki media.

5. Peran Media Sosial dan Respons Masyarakat terhadap Gerakan Feminisme

Media sosial membawa dampak signifikan dalam memperluas ruang perjuangan feminisme, tetapi tidak luput dari tantangan berupa resistensi publik.

NS menilai, "Cukup besar. Media sosial memberi ruang alternatif bagi kami untuk menyuarakan isu tanpa harus bergantung pada media arus utama." Begitu pula dengan ND yang mengatakan, "Sangat penting. Media sosial membuka peluang bagi jurnalis dan aktivis untuk menyuarakan isu feminisme lebih bebas dan menjangkau audiens luas."

NT menyebut, "Meski bukan media konvensional, media sosial memungkinkan penyebaran gagasan secara cepat. Ini jadi saluran penting meski tetap ada risiko disinformasi." Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan media sosial bisa menjadi kekuatan sekaligus tantangan.

Lalu NK menegaskan, "Media sosial memperluas jangkauan ide-ide feminis, tapi juga menciptakan medan pertempuran baru dengan kelompok yang menentang kesetaraan gender." Ini berarti bahwa media sosial menjadi arena kontestasi yang sengit. NF menyatakan, "Sangat efektif untuk kampanye gerakan. Tapi algoritma platform kadang tidak mendukung, dan konten feminis sering disensor atau diserang." Maka, strategi digital juga harus adaptif terhadap teknologi dan algoritma platform.

Media sosial membuka peluang besar untuk memperluas pengaruh gerakan feminisme, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa serangan digital dan resistensi dari masyarakat konservatif. Diperlukan strategi digital yang cerdas, adaptif, dan kolaboratif untuk memaksimalkan kekuatan media sosial sebagai alat perjuangan.

PEMBAHASAN

1. Representasi Gerakan Feminisme di Media Massa Indonesia

Representasi gerakan feminisme di media massa Indonesia masih jauh dari kata ideal. Banyak media menggambarkan feminisme secara sempit dan negatif, seolah-olah gerakan ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal yang patriarkal (L. K. Alfirdaus et al., 2022b). Citra feminisme sering kali direduksi menjadi isu-isu simbolik semata, seperti sorotan pada tokoh populer perempuan atau perayaan seremonial tertentu, tanpa membahas akar persoalan struktural ketimpangan gender. Kondisi ini membuat publik sulit memahami tujuan esensial dari feminisme sebagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan (Nazneen & Okech, 2021).

Dalam konteks ini, Mendes dan Carter (2021) menegaskan bahwa media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap feminisme, dan sering kali justru mengonstruksi narasi yang meminggirkan suara perempuan serta normalisasi ketimpangan gender. Representasi yang tidak adil dapat memperkuat stereotip dan menyudutkan aktivis feminis sebagai ancaman terhadap tatanan sosial.

Sementara beberapa media mulai memberikan ruang untuk narasi feminis, namun upaya ini masih bersifat reaktif, bukan sistemik. Media digital memang membuka ruang baru yang lebih inklusif, namun masih rentan terhadap distorsi karena rendahnya literasi digital dari pembuat dan konsumen konten. Dalam banyak kasus, narasi feminisme justru dibingkai secara sensational dan bias patriarkal. Oleh karena itu, perlunya kesadaran kolektif di kalangan media untuk menyajikan representasi feminisme secara utuh, kritis, dan berbasis perspektif keadilan gender (Figueroa-Domecq & Segovia-Perez, 2020).

2. Tantangan yang Dihadapi oleh Aktivis Feminis dalam Melawan Narasi Patriarki di Media

Tantangan utama yang dihadapi oleh aktivis feminis dalam melawan narasi patriarki di media adalah kuatnya dominasi ideologi konservatif dalam struktur media itu sendiri. Aktivis sering kali dihadapkan pada stigma, misalnya dituduh anti-laki-laki atau dianggap melawan norma budaya. Representasi media yang bias turut memperkuat stereotip ini, menjadikan feminisme sebagai isu yang dianggap "mengganggu ketertiban sosial." Bahkan di ruang redaksi, isu feminis masih dianggap sensitif dan sering kali dipinggirkan atau diperlakukan dengan standar ganda (Gupta et al., 2023).

Menurut Byerly (2020), struktur industri media yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki dan hierarki kekuasaan maskulin menciptakan hambatan sistemik bagi suara-suara feminis untuk masuk dan diterima secara adil di ruang publik. Aktivistis harus menghadapi berbagai bentuk perlawanan, mulai dari sensor editorial hingga tekanan dari pemilik media atau sponsor yang menghindari isu “kontroversial.”

Di era media digital, tantangan semakin kompleks. Meskipun media sosial memungkinkan aktivis menyebarkan pesan secara luas dan mandiri, mereka juga menghadapi risiko tinggi seperti doxing, pelecehan daring, dan ujaran kebencian yang bersifat misoginis. Tekanan psikologis dari serangan digital ini sering kali menghambat aktivis dalam menyampaikan edukasi gender secara efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman jurnalis terhadap konsep gender memperkuat bias dalam pemberitaan. Semua hambatan ini menuntut aktivis feminis untuk tidak hanya cerdas dalam strategi komunikasi, tetapi juga membangun aliansi yang kuat dengan media progresif (Prasetya & Oktafiyani, 2023).

3. Peran Media Massa dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender

Media massa memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan sosial dalam mendorong kesetaraan gender. Untuk itu, media perlu memberikan ruang yang lebih adil terhadap narasi-narasi perempuan dan menghindari stereotip gender yang merugikan. Salah satu langkah awal adalah dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap aspek pemberitaan, bukan hanya saat membahas isu perempuan semata. Hal ini memerlukan komitmen redaksional serta pelatihan jurnalis agar memiliki pemahaman yang memadai terkait keadilan gender (Deem & Deem, 2023).

Gallagher dan Sarikakis (2019) menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menormalkan atau menantang ketimpangan sosial tergantung pada bagaimana mereka membingkai informasi. Ketika media mulai menampilkan perempuan dalam berbagai peran sosial secara setara, menggunakan bahasa yang netral gender, dan menghadirkan narasumber perempuan dari berbagai latar belakang, maka pesan kesetaraan dapat tersebar lebih luas dan efektif.

Selain itu, media juga dapat mendorong kesetaraan dengan mengadakan kampanye kolaboratif, memfasilitasi diskusi publik yang inklusif, serta menggunakan data dan riset sebagai dasar dalam menyampaikan informasi. Perubahan kebijakan redaksi juga penting, termasuk keberagaman gender dalam tim jurnalis dan manajemen media. Di era digital, media harus memastikan bahwa ruang daring menjadi tempat yang aman bagi perempuan untuk bersuara. Dengan demikian, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam membentuk masyarakat yang lebih adil gender.

4. KESIMPULAN

Gerakan feminisme di media massa Indonesia masih direpresentasikan secara sempit dan bias, sering kali tidak mencerminkan perjuangan yang sesungguhnya. Aktivistis feminis menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma negatif, tekanan editorial, dan serangan digital yang memperkuat narasi patriarki. Meski demikian, media tetap memiliki peran strategis dalam mendorong kesetaraan gender jika mampu menyajikan pemberitaan yang adil, mengedukasi publik, dan melibatkan perspektif gender secara konsisten. Kolaborasi antara media dan pegiat gender sangat diperlukan untuk menciptakan ruang informasi yang inklusif dan bebas dari stereotip.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alfirdaus, L. K., Divina, L. A., & Fitriyah, F. (2022a). Anti-feminist Movement, Hegemonic Patriarchy, and Gender Equality Challenges: The Case of the Sexual Violence Elimination Bill. *Humaniora*, 34(2), 117–126. <https://doi.org/10.22146/JH.73538>

- Alfirdaus, L. K., Divina, L. A., & Fitriyah, F. (2022b). Anti-feminist Movement, Hegemonic Patriarchy, and Gender Equality Challenges: The Case of the Sexual Violence Elimination Bill. *Humaniora*, 34(2), 117–126. <https://doi.org/10.22146/JH.73538>
- Alfirdaus, L. K. (Laila), Divina, L. A. (Lupya), & Fitriyah, F. (Fitriyah). (2022). Anti-feminist Movement, Hegemonic Patriarchy, and Gender Equality Challenges: the Case of the Sexual Violence Elimination Bill. *Humaniora*, 34(2), 117–126. <https://doi.org/10.22146/JH.73538>
- Byerly, C. M. (2020). *Global Report on the Status of Women in the News Media*. International Women's Media Foundation.
- Deem, A., & Deem, A. (2023). "Feminine, Not Feminist": Trad Truth-making on Social Media. *Ethnologia Europaea*, 53(2). <https://doi.org/10.16995/EE.8841>
- Demirhan, K., & Çakir-Demirhan, D. (2015). Gender and politics: Patriarchal discourse on social media. *Public Relations Review*, 41(2), 308–310. <https://doi.org/10.1016/J.PUBREV.2014.11.010>
- Edström, J., Greig, A., & Skinner, C. (2024). Patriarchal (Dis)orders: Backlash as Crisis Management. <https://doi.org/10.1086/726744>, 49(2), 277–309. <https://doi.org/10.1086/726744>
- Figuroa-Domecq, C., & Segovia-Perez, M. (2020). Application of a gender perspective in tourism research: a theoretical and practical approach. *Journal of Tourism Analysis*, 27(2), 251–270. <https://doi.org/10.1108/JTA-02-2019-0009/FULL/PDF>
- Fotaki, M., & Pullen, A. (2024). Feminist Theories and Activist Practices in Organization Studies. *Organization Studies*, 45(4), 593–616. <https://doi.org/10.1177/01708406231209861>
- Gallagher, M., & Sarikakis, K. (2019). *Gender and Communication: Theoretical Approaches and Research Practices*. Palgrave Macmillan.
- Gupta, M., Madabushi, J. S., & Gupta, N. (2023). Critical Overview of Patriarchy, Its Interferences With Psychological Development, and Risks for Mental Health. *Cureus*, 15(6), e40216. <https://doi.org/10.7759/CUREUS.40216>
- Hamid, M. A., Basid, A., & Aulia, I. N. (2021). The reconstruction of Arab women role in media: a critical discourse analysis. *Social Network Analysis and Mining*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/S13278-021-00809-0/METRICS>
- Maryani, E., Janitra, P. A., & Ratmita, R. A. (2021). @Indonesiatanpafeminis.id as a Challenge of Feminist Movement in Virtual Space. *Frontiers in Sociology*, 6, 668840. <https://doi.org/10.3389/FSOC.2021.668840>
- Mendes, K., & Carter, C. (2021). *Feminism and the Media: Representations in Public Discourse*. Routledge.
- Moore, L. J., & Sirri, L. (2024). From Theory to Action: A Saudi Arabian Case Study of Feminist Academic Activism against State Oppression. *Societies* 2024, Vol. 14, Page 31, 14(3), 31. <https://doi.org/10.3390/SOC14030031>
- Nazneen, S., & Okech, A. (2021). Introduction: feminist protests and politics in a world in crisis. *Gender & Development*, 29(2–3), 231–252. <https://doi.org/10.1080/13552074.2021.2005358>
- Prasetya, A. A. A. D., & Oktafiyani, E. (2023). Teenager's Resistance to Patriarchy in School: A Feminist Movement Representation on Moxie Film. *Buletin Al-Turas*, 29(2), 241–256. <https://doi.org/10.15408/BAT.V29I2.27500>
- Valdivia, A. N., & Projansky, S. (2006). Feminism and/in mass media. *The SAGE Handbook of Gender and Communication*, 273–296. <https://doi.org/10.4135/9781412976053>

